

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMENYAN

Karina Tri Ayudiasari^{1)*}

Universitas Al Ghifari Bandung, Indonesia¹⁾

*Email: karinaayudia12@gmail.com**

Riwayat Artikel

Diterima: 21 Agustus 2022

Disetujui: 25 September 2022

Diterbitkan: 9 Oktober 2022

Abstract

This research uses qualitative research regarding the Implementation of the Family Hope Program in Padasuka Village, Cimenyan District. This research focuses on four dimensions of policy implementation, these dimensions include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The background to this research is that the implementation of the Family Hope Program in Padasuka Village, Cimenyan District has not been optimal. The aim of this research is to find out how the Family Hope Program is implemented in Padasuka Subdistrict, Cimenyan District (Study of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 1 of 2018), the inhibiting factors in implementing the family hope program, as well as efforts to overcome these obstacles. The data collection techniques used in this research are interview, documentation and observation techniques. The data analysis technique used is the data reduction method, data presentation, while the data validity test uses the data reduction method, data presentation, while the data validity test used in this research uses the triangulation technique with sources. The implementation of the Family Hope Program in Padasuka Village, Cimenyan District has implemented the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure along with their indicators. However, there are several indicators that have not gone according to the community's wishes, including in the communication dimension, the Padasuka Subdistrict government has not yet carried out intensive communication with PKH facilitators regarding data on potential PKH recipients, resulting in the distribution of aid not being on target.

Keywords: Policy Implementation, Inhibiting Factors, Mitigation Efforts

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan. Penelitian ini berfokus pada empat dimensi implementasi kebijakan, dimensi tersebut meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini karena Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan belum maksimal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan (Studi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018), faktor penghambat dalam implementasi program keluarga harapan, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan metode reduksi data, penyajian data, sedangkan uji validitas data ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, sedangkan uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan sudah

diterapkan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi beserta indikatornya. Namun, ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain dalam dimensi komunikasi, pemerintah Kelurahan Padasuka masih belum melakukan komunikasi yang intensif dengan pendamping PKH terkait data calon penerima PKH sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat, Upaya Penanggulangan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa teratasi sejak kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia hingga masa pemerintahan yang sekarang. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negaranegara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan ini menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, dimana kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan terjadi karena ketidak berdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang di hadapinya.

Kemiskinan merupakan isu yang menakutkan di dunia, khususnya di Indonesia, sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Kepemilikan alat produksi, produktivitas, dan tingkat pembangunan masyarakat, serta penggunaan program pembangunan nasional, merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi kemiskinan di masyarakat. Dengan kata lain, kurangnya akses terhadap kepemilikan dan penggunaan faktor- faktor produksi, serta terbatasnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang memadai, terkait dengan masalah ekonomi struktural (Hasan et al., 2022; Nugroho, 2015; Nugroho et al., 2020).

Kemiskinan yang menimbulkan dampak negatif ke berbagai aspek, diantaranya pendidikan yang tidak berkualitas, akses kesehatan yang kurang memadai, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses terhadap layanan publik, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga, serta masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal dan kejahatan (Anagnostou et al., 2021; Anshary et al., 2021; Tilak, 2002). Pada tahun 2022,

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Kemiskinan seolah tak ada habisnya di Republik Indonesia ini hingga pemerintah membuat berbagai macam program kerja untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menggunakan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Melihat masalah kemiskinan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kota Bekasi hingga saat ini. Dimana, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu langkah menuju sistem jaminan sosial, yang didirikan pada tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang termasuk dalam basis data penanggulangan

kemiskinan terpadu, ditangani oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Serta, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan juga menjadi landasan hukum program tersebut. Program ini menawarkan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersyarat, sebuah strategi program bantuan sosial yang selama ini telah digunakan oleh banyak negara. Karakteristik utama dari program bantuan ini adalah bahwa ia membebaskan persyaratan pada perilaku penerima program.

Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Kemiskinan itu sendiri dapat juga didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Suparlan (2004 : 315) juga mendefinisikan kemiskinan sebagai “suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin”.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program Keluarga Harapan pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) kepada keluarga sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi ketentuan. Tujuan dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk membantu masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek. Selain itu Program Keluarga Harapan merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) pada Provinsi Jawa Barat mulai diberlakukan pada tahun 2007 dengan fokus diberbagai kabupaten dengan sebaran desa yang memiliki koefisien penduduk miskin yang tinggi.

Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan merupakan salah satu wilayah yang terdata adanya program keluarga harapan, Kelurahan Padasuka dibagi menjadi 14 RW, yang kemudian dibagi menjadi 107 RT, dengan luas wilayah 51,5Ha atau 6,32% dari luas kota Bandung. Kelurahan Padasuka merupakan daerah urban dimana sebagian besar penduduknya adalah pekerja dengan jumlah masyarakatnya 64% bermata pencaharian sebagai pegawai pabrik sehingga struktur perekonomiannya didominasi dari sektor industri.

Penerima program keluarga harapan di Kelurahan Padasuka masih memiliki kekurangan yang penulis teliti sebelumnya adanya ketidakmerataan program keluarga harapan tersebut,

masih adanya oknum yang menyalahgunakan program keluarga harapan tersebut, sehingga peneliti ingin mengobservasi lebih dalam mengenai program keluarga harapan di Kelurahan Padasuka.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di Kelurahan Padasuka. Di Kelurahan Padasuka sendiri angka kemiskinan juga masih cukup tinggi yaitu sekitar 342 jiwa, hal tersebut mempresentasikan bahwa masalah kemiskinan di Kelurahan Padasuka belum bisa di tanggulangi dengan baik. Jika kemiskinan ini tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kriminalitas, meningkatkannya angka kematian, pengangguran akan semakin banyak, serta terjadinya konflik dimasyarakat. Untuk itu dengan adanya PKH ini diharapkan dapat mengecilkan angka kemiskinan di Kecamatan Cimenyan, khususnya di Kelurahan Padasuka. Kemudian untuk di Kelurahan Padasuka sendiri, Implementasi Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut dikarenakan adanya penyaluran bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari fakta lapangan yang menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang tergolong dalam kategori mampu, tapi masih mendapatkan bantuan dari PKH.

Seperti di salah satu desa, ada masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai bank swasta yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat dari PKH. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran PKH ini tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 yang berbunyi “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan PKH ini merupakan masyarakat miskin atau rentan miskin, artinya masyarakat yang tidak tergolong kedalam masyarakat miskin atau rentan miskin tidak berhak mendapatkan bantuan PKH.

Jika kita lihat data Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan adalah 342 KPM sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang tidak mampu berjumlah 623 KK tidak mampu, sehingga tidak sebanding antara KK tidak mampu dan KPM di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pihak pemerintah desa, Kecamatan, pendamping PKH, serta dari masyarakat itu sendiri untuk saling bekerjasama agar penyaluran bantuan PKH bisa tepat sasaran. Menurut penelitian terdahulu, Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diimplementasikan di negara- negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, Honduras, Jamaika, dan Nikaragua yang dikenal dengan program Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tergolong berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Karena program ini berusaha untuk mengubah hidup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan cara memberikan bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan. (Rafiuddin, Muh, 2016). Berdasarkan pengamatan awal ditemukan masalah awal dalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu :

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan dalam sosialisasi dari pihak penyelenggara program dan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga program ini belum terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya KPM di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan yang dianggap sudah mampu menjadi sasaran program belum memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri sehingga masyarakat yang benar benar tidak mampu yang seharusnya berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah ini tidak

mendapatkan hak nya sesuai dengan tujuan adanya program PKH ini.

2. Belum optimalnya struktur birokrasi yaitu kurang berjalannya kelompok PKH di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan yang dibentuk pelaksana program atau pendamping PKH, sehingga program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.
3. Masih lemahnya kedisiplinan para penyelenggara program dalam mengembangkan PKH di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan. Hal ini dilihat dari tidak tercapainya program tersebut sesuai dengan target awal yang telah ditentukan seperti hal nya dalam pelaksanaannya saling mengandalkan satu sama lain serta pencairan dana PKH yang tidak selalu tepat waktu di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan, dikarenakan pendamping PKH dengan KPM tidak sebanding.
4. Koordinasi yang lemah antara pihak Kelurahan Padasuka dengan pihak penyelenggara program, sehingga adanya penyimpangan dalam menentukan anggota PKH tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penerima PKH yang tergolong mampu memperoleh bantuan PKH sementara.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMENYAN”

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya Implementasi Kebijakan PKH di Kelurahan Padasuka. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan hubungan antara desain PKH sebagai sebuah kebijakan publik dengan realitas implementasi yang dilakukan oleh implementor program di Kelurahan Padasuka Proses implementasi PKH tersebut meliputi kegiatan penetapan sasaran (targeting), pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok KSM (Keluarga Sangat Miskin), penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutahiran data KSM.

Selain siklus tersebut, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang turut mempengaruhi implementasi PKH, kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan model Implementasi George C. Edward III dalam Agustino (2014:149) mengemukakan 4 dimensi yang berperspektif top down, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik.

Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Maka indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekwensi- konsekwensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Yagus Triana H.S. & Kristian, I. 2021). Sejalan dengan pendapat Creswell dalam (Murdiyanto,2020:19) mendefinisikan “pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia”.

Sedangkan uji validasi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Murdiyanto (2020:69) bahwa : “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.”

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia. Program ini diperuntukan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 yang berbunyi “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”. Program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dikarenakan masih ada permasalahan seperti adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan program keluarga harapan, sedangkan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan yang tergolong mampu sudah mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurut Edward III (dalam Widodo 2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain Komunikasi, sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan mengenai ke 4 faktor pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Padasuka sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan pembangunan rencana strategis di Kelurahan Padasuka, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang dilaksanakan dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di kelurahan padasuka masih belum optimal, karena kurangnya koordinasi antara Pendamping PKH dengan Pemerintah kelurahan padasuka yang akhirnya menimbulkan data yang tidak akurat dan tepat sasaran. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat miskin yang ada di kelurahan padasuka belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan hal tersebut diperkuat oleh Ketua PKH di RW 2 yaitu “Masih adanya miss komunikasi antara Pendamping PKH dengan pemerintah kelurahan Padasuka, sehingga banyak masyarakat yang tidak ter data jadi tidak mendapatkan bantuan”.

Sumber daya

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penuntasan kemiskinan di Indonesia. Program ini bertujuan agar masyarakat miskin bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan perlu adanya dukungan dari berbagai sumber, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat

membantu mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan.

Sumber daya pada proses implementasi program keluarga harapan di kelurahan padasuka kecamatan cimenyan berhubungan dengan pihak pelaksana dan keluarga penerima manfaat. Sumber daya manusia dari pihak kelurahan dapat dilihat dari jumlah pelaksana yang menangani program keluarga harapan tersebut, pihak kelurahan terdapat pendamping pkh hanya 1 orang yang menaungi 14 rw sehingga koordinasi dan pemantauan tidak berjalan dengan baik, dan dari keluarga penerima harapan nya pun masyarakat yang sudah tergolong mampu dan tanggungannya sudah beres tidak ada seharusnya sudah di graduate dari KPM tetapi masih bertahan sebagai KPM yang seharusnya sudah tidak diberikan bantuan tersebut dan dialihkan ke masyarakat yang memang layak mendapatkannya. Berdasarkan hasil penelitian kepada masyarakat penerima PKH menyatakan bahwa “Pendamping PKH tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, tidak ada monitoring atau pemantauan ke masyarakat secara langsung”.

Disposisi (Kecenderungan)

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut. Hal ini berarti perlu adanya dukungan langsung dari pemerintah agar masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kesejahteraan dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan harus merata dan harus mendahulukan masyarakat miskin. Perlu adanya pengkajian khusus terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) yang tergolong mampu. Seluruh KPM yang tergolong mampu tentunya harus mempunyai kesadaran bahwa sepatutnya mereka tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKH seperti yang dijelaskan oleh Kasi Sosial Di Kelurahan Cimenyan sebagai berikut : “Kalau untuk struktur birokrasi PKH di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan ini hanya bapa sendiri, membawahi ketua kelompok setiap rw, sehingga masih ada terjadi kurang koordinasi dan pemantauan langsung dari pihak Kelurahan nya terdkadang masih ada saja masyarakat yang belum sadar untuk mengundurkan diri, padahal dia sudah bekerja dan mampu”.

Struktur Birokrasi

Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan- keperluan publik (public affair). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan- keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan.

Struktur birokrasi pemerintah kelurahan Padasuka kecamatan Cimenyan perlu ditingkatkan lagi, hubungan antar sub bidang harus terkoordinasi dengan baik agar terciptanya suatu tatanan pemerintah yang maju. Selain itu, demi terciptanya Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan yang baik dan tepat sasaran, pemerintah kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan harus berkoordinasi dengan Pendamping PKH agar penyaluran bantuan PKH tidak menyeleweng dan tidak mengedepankan asas kekeluargaan dan kekerabatan dalam pendataan calon penerima bantuan PKH. Selain itu, pemerintah kelurahan padasuka kecamatan Cimenyan bersama Pendamping PKH harus bekerjasama agar masyarakat yang sudah mampu atau tidak layak mendapatkan PKH bisa diberikan pengarahan agar masyarakat tersebut sadar bahwa masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dengannya. Untuk itu seluruh pihak terkait bantuan PKH harus satu tujuan agar Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan bisa tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil

penelitian kepada masyarakat penerima PKH menyatakan bahwa “kurangnya pengawasan oleh pendamping pkh terhadap ketua di setiap rw nya sehingga belum terlaksannya program pkh ini dengan baik”

Pelaksanaan kebijakan publik memang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Akan selalu ada halangan dan rintangan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kompleksitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah akan selalu menemui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sama halnya dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan akan selalu ada hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat seluruhnya ingin mendapatkan bantuan pemerintah, tidak memandang dia kaya atau miskin semuanya ingin mendapatkan bantuan pemerintah. Hal ini berarti kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang tujuan dan sasaran dari program pemerintah yang dilaksanakan. Seperti halnya Program Keluarga Harapan, seluruh masyarakat Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan tentunya ingin mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi pemerintah tidak bisa memberikan bantuan PKH ini kepada sembarang orang karena tidak banyak yang diberikan pemerintah sehingga tidak semua masyarakat miskin juga mendapatkan bantuan pemerintah tersebut, jadi akan lebih memfokuskan kepada yang berhak menerimanya.
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Pendamping PKH, Pemerintah Kelurahan Padasuka dan ketua kelompok di setiap RW terkait pemilihan data masyarakat calon penerima bantuan PKH, sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan PKH tidak tepat sasaran. Hal ini tentunya perlu adanya pengkajian khusus terkait data calon penerima bantuan agar masyarakat bisa menerima bantuan pemerintah tersebut kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.
3. Adanya oknum dari ketua kelompok dan pemerintah desa yang berbuat sengaja mengalihkan data calon penerima bantuan PKH untuk keluarganya atau kerabat dekatnya. Hal ini sering ditemui di lapangan karena adanya struktur birokrasi yang rendah sehingga memungkinkan terjadinya hal yang demikian. Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan, masih adanya beberapa pemerintahan Desa yang mengalihkan data calon penerima bantuan PKH kepada keluarga atau kerabatnya. Hal tersebut akan menghambat penyaluran bantuan PKH menjadi tidak tepat sasaran.
4. Komunikasi yang dilaksanakan dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka masih belum optimal, karena kurangnya koordinasi antara Pendamping PKH dengan Pemerintah Kelurahan Padasuka yang akhirnya menimbulkan data yang tidak akurat dan tepat sasaran.

Agar Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan bisa dilaksanakan dengan lancar, pemerintah harus melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Keluarga Harapan. Untuk itu upaya – upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Padasuka akan lebih memperhatikan masyarakat miskin untuk diperjuangkan dalam pemberian bantuan pemerintah, agar terjadinya pemerataan kesejahteraan sosial di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan. Terlebih lagi kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan akan bekerja keras agar masyarakat miskin bisa hidup lebih sejahtera.
2. Pemerintah Kelurahan Padasuka akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pendamping PKH terkait dengan pengkajian data calon penerima bantuan PKH agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran dan terjadi pemerataan penerima bantuan dari kalangan masyarakat miskin. Serta akan mengkaji data penerima bantuan yang tidak

layak agar bias dialihkan kepada masyarakat miskin atau yang lebih membutuhkan bantuan.

3. Terkait dengan adanya oknum yang melakukan praktek Nepotisme atau mengedepankan asas kekeluargaan dan kekerabatan dalam pemilihan data calon penerima bantuan, pemerintah Kelurahan Padasuka akan melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai desa serta kecamatan agar tidak melakukan hal – hal yang dapat menghambat penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat yang membutuhkan. Agar terjadinya Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi suatu kebijakan publik harus diawasi oleh semua pihak agar pelaksanaannya sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan serta pemerintah bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga harus didukung oleh masyarakat agar dalam pencapaian tujuan bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Adanya hambatan akan membuat pencapaian tujuan dari pemerintah berjalan dengan lambat. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak.

Jumlah data keluarga miskin dan keluarga yang mendapatkan bantuan PKH atau disebut sebagai KPM di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan. Jumlah keluarga miskin di Kelurahan Padasuka adalah sekitar 5.483 Keluarga dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sekitar 3.731 Keluarga. Data tersebut peneliti dapatkan dari pihak kantor Kelurahan Padasuka. Dapat dilihat bahwa terjadi selisih data antara keluarga miskin dan KPM di Kelurahan Padasuka yaitu sekitar 1.752 Keluarga yang masih belum mendapatkan bantuan PKH. Kemudian hasil dari wawancara dengan salah satu pendamping PKH, data KPM yang tergolong mampu diperkirakan berjumlah sekitar 100 KPM atau sebesar 3.4%. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan angka selisih tadi menjadi semakin besar yang berarti angka kemiskinan juga akan menjadi lebih besar lagi. Mengapa demikian? karena yang seharusnya mendapatkan PKH itu adalah masyarakat miskin atau rentan miskin, sedangkan dalam data tersebut tercatat sekitar 3.4% masyarakat di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan yang sudah mampu namun masih menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan pada dasarnya telah dijalankan sesuai indikator implementasi kebijakan publik menurut Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Dimensi komunikasi dan struktur birokrasi menjadi aspek yang paling lemah, terlihat dari kurangnya koordinasi serta komunikasi intensif antara pemerintah kelurahan dan pendamping PKH sehingga penyaluran bantuan sering tidak tepat sasaran, bahkan diperparah oleh adanya praktik nepotisme di beberapa RW. Faktor penghambat lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang cenderung ingin menerima bantuan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah kelurahan berkomitmen meningkatkan prioritas kepada masyarakat miskin, memperbaiki koordinasi dengan pendamping PKH agar data lebih akurat, serta melakukan pembinaan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga implementasi PKH ke depan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2016). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, L. (2014). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:: Alfabeta. Ali, F. (2019). Teori dan Konsep

- Administrasi. Malang: Rajawali Pers. Anggara, S. (2017). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka.
- Atmosudirdjo, P. (2015). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Dwiyanto, A. (2018). Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia. Jakarta: Alfabeta. Juharni. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Makassar: CV Sah Media. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Mulyadi, Dedy (2018). Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Riant D. 2008. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Alex Media Rafiuddin, Muh. 2016. Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Rahayu, Sri Lestari. 2012. Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan). Bandung: Fokus Media.
- Ridwan. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pres.
- Rohana Thaiher dan Makmur. (2017). Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Siagian, Sondang P. (2017) Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudaryana, Bambang. (2017). Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraandan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media
- Suparlan, Parsudi. 2004. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suratman, dkk. 2019. Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung: Refika Aditama Syafiie, Inu Kencana & Welasari, 2017. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing. Malang.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: Caps